



Sistem Pendaftaran Kepesertaan Proyek Jasa konstruksi Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda

¹Rassel Putra Adhia, ²Jojok Dwiridotjahjono

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No.1, Gn.Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur, 60294
Email : ¹21042010050@student.upnjatim.ac.id, ²dwiridotjahjono_jojok@upnjatim.ac.id

Abstrak

Prosedur pendaftaran kepesertaan jasa konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Juanda bertujuan untuk mempermudah pendaftaran kepesertaan bagi pekerja kontraktor, sehingga mereka dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial dan manfaat dari program-program yang mereka ikuti. Metode pelaksanaan ini dilakukan secara nyata sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di bagian kepesertaan, serta partisipasi aktif dalam membantu unit kepesertaan selama proses magang.

Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa prosedur pendaftaran kepesertaan jasa konstruksi dimulai saat kontraktor mengunjungi BPJS Ketenagakerjaan untuk mendaftarkan pekerjaannya. Langkah-langkahnya mencakup pengisian formulir dengan melampirkan dokumen Surat Perintah Kerja (SPK), pemrosesan melalui sistem, pengeluaran dokumen besaran iuran, hingga pembayaran iuran oleh kontraktor kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai bukti diterimanya sebagai peserta di lembaga tersebut.

Penelitian ini tidak menggunakan hipotesis karena lebih berfokus pada deskripsi langkah-langkah praktis. Dalam konteks teori, penelitian ini merujuk pada prosedur administratif dan regulasi terkait kepesertaan jasa konstruksi. Dengan demikian, hasil penelitian memberikan pandangan terperinci tentang pelaksanaan prosedur pendaftaran, memudahkan pemahaman para pekerja kontraktor, dan mendukung efisiensi administratif di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Juanda.

Kata Kunci : Jasa Konstruksi, Kepesertaan, Pelayanan, Pendaftaran

Abstract

The construction services membership registration procedure at BPJS Ketenagakerjaan Juanda Branch Office aims to facilitate membership registration for contractor workers, so that they can obtain social security protection and benefits from the programs they participate in. Another goal is for workers to understand in detail the flow of registration for construction services membership. This implementation method is carried out in reality according to actual conditions. Data collection was done through direct observation in the service department, as well as active participation in assisting the service unit during the internship process.

The implementation results show that the construction services membership registration procedure begins when the contractor visits BPJS Ketenagakerjaan to register his work. The steps include filling out the form by attaching a Work Order (SPK) document, processing through the system, issuing a contribution amount document, to payment of contributions by the contractor to BPJS Ketenagakerjaan as proof of acceptance as a participant in the institution.

This research does not use hypotheses because it focuses more on describing practical steps. In the context of theory, this research refers to administrative procedures and regulations related to the membership of construction services. Thus, the research results provide a detailed view of the implementation of registration procedures, facilitate the understanding of contractor workers, and support administrative efficiency at BPJS Ketenagakerjaan Juanda Branch Office.

Keywords: Construction Services, Membership, Services, Registration

PENDAHULUAN

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan perkembangan sektor ketenagakerjaan di Indonesia, pemahaman yang mendalam tentang sistem jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi esensial bagi setiap individu. BPJS Ketenagakerjaan, sebagai lembaga sentral dalam penyelenggaraan program-program ini, menjadi pilihan strategis untuk penelitian praktis dan pengalaman langsung di lapangan.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan inisiatif jaminan sosial bagi Tenaga Kerja Indonesia (WNI) yang bertujuan melindungi semua tenaga kerja dari masalah dan risiko terkait hubungan kerja. Sebagai program jaminan tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran kunci, dengan kewajiban perusahaan mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta sesuai ketentuan program jaminan sosial.

Dasar hukum BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 menegaskan kewajiban pendaftaran dan sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 82/PUU-X/2012 memvalidasi validitas hukumnya.

Dengan Tujuan untuk menggali pandangan dan pemahaman staff BPJS Ketenagakerjaan terkait Bidang Kepesertaan Jasa Konstruksi dalam dan melakukan pendaftaran tenaga kerja pada program BPJS Ketenagakerjaan. Dengan menggunakan Pelaksanaan ini dilakukan dengan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai proses pendaftaran dalam proyek jasa konstruksi. Apakah kegiatan tersebut di BPJS Ketenagakerjaan sudah berjalan efektif menjadi fokus utama dari penelitian ini.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dapat dijelaskan melalui pendekatan dan proses yang diterapkan dalam melaksanakan suatu tugas atau kegiatan. Menurut Henry Fayol, metode pelaksanaan yang baik mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. Metode pelaksanaan yang efektif melibatkan koordinasi yang baik antara berbagai bagian organisasi.

Pelaksanaan ini dilakukan dengan pendekatan mendalam terhadap staf dan karyawan BPJS Ketenagakerjaan serta terjun langsung untuk melakukan kegiatan tersebut.

Metode pelaksanaan ini melibatkan karyawan atau staf BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki pemahaman dan pengalaman terkait dengan proses alur Pendaftaran Kepesertaan Jasa Konstruksi. Selain itu, tujuan pelaksanaan ini akan mengevaluasi apakah kegiatan tersebut telah berjalan secara efektif dan efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pelaksanaan yang dilakukan terkait pelayanan dan pendaftaran kepesertaan jasa konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda didapatkan melalui pendekatan dengan karyawan atau staf BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda dan terjun langsung dalam kegiatan tersebut. Hasil menunjukkan bahwa proses Pelayanan dan Pendaftaran Kepesertaan Jasa Konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan dimulai dengan mengisi formulir yang berisi data proyek yang akan didaftarkan. Dalam menjalankan suatu kegiatan, pasti diperlukan prosedur tertentu., Berikut ini prosedur dalam kegiatan Pelayanan dan Pendaftaran Kepesertaan Jasa Konstruksi pada BPJS Ketenagakerjaan :

1. Pengisian formulir Proyek oleh perusahaan
2. Proses Pengecekan Formulir oleh kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan
3. Pendaftaran Proyek berdasarkan formulir yang telah diisi oleh perusahaan.
4. Cetak bukti surat penetapan bahwa proyek telah didaftarkan.

5. Perusahaan melakukan pembayaran dengan kode pembayaran yang sudah tertera di surat penetapan.
6. Proyek terdaftar dan telah aktif.

Dalam proses Pelayanan dan Pendaftaran Kepesertaan Jasa Konstruksi, formulir pendaftaran yang memuat informasi mengenai proyek memegang peranan krusial karena diperlukan untuk melengkapi registrasi proyek. Selain itu, Surat Perintah Kerja (SPK) juga menjadi persyaratan pokok dalam mengajukan kepesertaan jasa konstruksi.

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, kendala seringkali tak terhindarkan, termasuk dalam proses pendaftaran kepesertaan jasa konstruksi. Beberapa hambatan yang mungkin muncul antara lain gangguan pada platform web SMILE, serta

kurangnya kelengkapan informasi proyek dari pihak perusahaan, yang dapat memperlambat atau menghambat proses pendaftaran.

Menurut karyawan atau staf BPJS Ketenagakerjaan, efektivitas kegiatan pelayanan dan pendaftaran kepesertaan jasa konstruksi dinilai sudah memadai karena proses pendaftaran terbilang cukup sederhana. Namun, aspek yang memerlukan waktu lebih lama adalah penginputan nama-nama pekerja secara individual sesuai dengan jumlah pekerja di proyek tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pendaftaran kepesertaan jasa konstruksi, staff dan karyawan BPJS Ketenagakerjaan tidak membuat perbedaan antara perusahaan kecil, menengah, atau besar. Hal ini karena pendaftaran kepesertaan jasa konstruksi dilakukan tanpa memandang skala perusahaan, sejalan dengan tujuan utama BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan semua tenaga kerja.

Seiring dengan pelaksanaan layanan dan proses pendaftaran kepesertaan jasa konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda, kita dapat melihat perbandingan dengan konsep dan teori pelaksanaan menurut Henry Fayol. Fayol, seorang pakar manajemen terkemuka, menyajikan prinsip-prinsip manajemen yang mencakup fungsi-fungsi dasar, termasuk perencanaan, organisasi, koordinasi, komando, dan pengendalian.

Dalam konteks pelayanan dan pendaftaran kepesertaan jasa konstruksi, prinsip perencanaan dapat diamati dalam proses pengisian formulir yang mencakup informasi proyek secara komprehensif. Organisasi terjadi melalui tahapan manajemen data dan dokumen proyek, sementara koordinasi muncul saat BPJS Ketenagakerjaan memantau dan memverifikasi proses pendaftaran. Prinsip komando tercermin dalam ketaatan perusahaan terhadap prosedur dan petunjuk BPJS, sementara pengendalian dilakukan melalui pemeriksaan dan verifikasi data proyek.

Meskipun proses penginputan data pekerja proyek memakan waktu yang lebih lama, prinsip-prinsip Fayol, seperti pengaturan dan kontrol, dapat diidentifikasi dalam usaha untuk memastikan akurasi dan keabsahan data. Dengan menerapkan konsep-konsep ini, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda dapat memastikan bahwa kegiatan pelayanan dan pendaftaran kepesertaan jasa konstruksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang telah terbukti seiring waktu, menciptakan lingkungan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan program-program jaminan sosial.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa pelayanan dan pendaftaran kepesertaan jasa konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda dinilai efektif. Waktu yang diperlukan dalam proses tersebut dianggap cukup cepat, terutama dalam pengisian formulir yang berisi informasi proyek. Meskipun demikian, kendala utama muncul dalam penginputan data individu pekerja proyek, yang memakan waktu lebih lama.

Prosedur pendaftaran, seperti pengisian formulir, pengecekan formulir oleh kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan, pendaftaran proyek, dan pembayaran dengan kode pembayaran, secara keseluruhan dijelaskan sebagai langkah-langkah yang harus diikuti oleh perusahaan

untuk mengaktifkan kepesertaan. Sanksi administratif diterapkan untuk perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS, menciptakan insentif untuk kepatuhan.

Kendala yang muncul dalam proses pendaftaran kepesertaan jasa konstruksi termasuk gangguan pada platform web SMILE dan kurangnya kelengkapan informasi proyek dari perusahaan. Meskipun demikian, staff dan karyawan BPJS Ketenagakerjaan tetap melakukan kegiatan koreksi dan validasi data tanpa memandang skala perusahaan, mencerminkan pendekatan yang konsisten terhadap semua peserta.

Tidak dilakukannya kegiatan pelayanan dan pendaftaran kepesertaan jasa konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan dapat berdampak negatif. Berkurangnya jumlah peserta dapat menghambat kinerja dan potensi perusahaan, sehingga menjadikan kegiatan ini memiliki peran yang signifikan dalam menjaga keberlanjutan program jaminan sosial bagi tenaga kerja.

Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun terdapat beberapa kendala, pelayanan dan pendaftaran kepesertaan jasa konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan telah berjalan efektif, memberikan manfaat bagi perusahaan dan tenaga kerja. Diperlukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi dalam proses penginputan data pekerja proyek, sambil tetap mempertahankan pendekatan yang adil terhadap semua jenis perusahaan.

SARAN

Untuk penelitian selanjutnya dapat menyelidiki lebih jauh solusi atau strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala utama yang muncul, terutama terkait dengan penginputan data individu pekerja. Identifikasi solusi praktis dan efisien akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kecepatan dan efektivitas proses seperti analisis lebih mendalam terhadap platform web SMILE. Investigasi mengenai sumber daya teknis dan solusi terhadap gangguan yang mungkin terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardikabima, Y., & Nugroho, A. (n.d.). Kesadaran Hukum Mitra Kerja Perusahaan Transportasi Umum Terkait Kepesertaan Mandiri BPJS Ketenagakerjaan (Studi Di PT Selamat Sugeng Rahayu) (Vol. 7, Issue 1). <http://www.sumbergroupbus.com/travel-info>,
- Brahmana, H., Kuara, G., Martha Santoso Sunjoyo, A., & Irawan, A. (2011). Kepatuhan Hukum Konsultan Pajak Kota Medan Terhadap Kewajiban Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan: Faktor Kewajiban Konsekuensi Hukum. In *Sei Putih Bar.Kec. Medan Petisah* (Issue 3). <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/search.html> pada
- Esthi, R. B., & Sukmawati, A. (2011). Sukmawati-Analisis Tingkat Penerapan Manajemen | 134. In *Jurnal Manajemen dan Organisasi: Vol. II* (Issue 2).
- Nursanjaya, S., Ag, M., & Pd. (2021). Memahami Prosedur Penelitian Kualitatif: *Panduan Praktis untuk Memudahkan Mahasiswa* (Vol. 04, Issue 01).
- Fayol, H. (1949). *General and Industrial Management*. London: Sir Isaac Pitman & Sons.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia*. (n.d.).
- Rahma, D. (n.d.). *Dwi Rahma Account; Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan Halaman 1488* (Vol. 8, Issue 2).
- Randa Layuk, L., & Aplonia Lau, E. (n.d.). Analisis Kinerja Keuangan BPJS Ketenagakerjaan.